

Diplomasi Publik China dalam Memperbaiki Citra di Masa Pandemi Virus COVID-19

Nina Widyaswasti Aisha, M.Sos
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Jayabaya
E-mail: ninashaaa@gmail.com

Abstrak

Pada masa pandemi virus Covid-19, China dikaitkan sebagai sumber dan penyebab penyebaran virus Covid-19, tuduhan tersebut kemudian merusak citra negara China dalam lingkup global. Rusaknya citra negara China berdampak pada kepentingan China dalam ranah global. Penelitian ini meneliti bagaimana pemerintah China melakukan praktik diplomasi publik di masa pandemi untuk memperbaiki citra China dalam ranah global. Penelitian ini menggunakan menggunakan teori diplomasi publik dan narasi strategis. Penelitian ini menemukan bahwa praktik diplomasi publik yang dilakukan oleh China di masa pandemi virus Covid-19 untuk memperbaiki citra dilakukan dengan menggunakan dua instrumen yaitu bantuan ekonomi sebagai *hard power*, dan vaksin serta alat kesehatan sebagai *soft power*. Pemberian bantuan tersebut merupakan upaya membentuk citra positif China, sekaligus upaya menegasikan narasi negatif terkait China.

Kata Kunci: China, Diplomasi Publik, Bantuan Ekonomi, Vaksin Covid-19, Citra

Abstract

During the Covid-19 virus pandemic, China was linked as the source and cause of the spread of the Covid-19 virus, these accusations then damaged the image of China in the global sphere. Damage to China's state image has an impact on China's interests in the global sphere. This research examines how the Chinese government practiced public diplomacy during the pandemic to improve China's image in the global sphere. This study uses public diplomacy theory and strategic narratives. This study found that the practice of public diplomacy carried out by China during the Covid-19 virus pandemic to improve its image was carried out using two instruments, namely economic assistance as hard power, and vaccines and medical devices as soft power. The provision of this assistance is an effort to build a positive image of China, as well as an effort to negate negative narratives related to China.

Keywords: China, Public Diplomacy, Economic Assistance, Covid-19 Vaccine.

Pendahuluan

Ditengah kondisi penyebaran virus Covid-19 yang telah menyebar secara pesat ke berbagai negara, berbagai pihak kini mulai menyalahkan China sebagai penyebab penyebaran virus Covid-19, salah satu pihak yang menyalahkan China adalah Amerika Serikat yang mempolitisasi permasalahan penyebaran virus Covid-19 untuk menyudutkan China. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan pernyataan kontroversial yang menyebut virus Covid-19 sebagai “Virus China”, dan menyebut bahwa kondisi yang dialami dunia pada saat ini yang terdampak penyebaran virus Covid-19, disebabkan oleh pemerintah China yang menutupi informasi terkait virus Covid-19 (Mangan, 2020). Pernyataan yang disampaikan oleh Donald Trump tersebut, dapat dipahami sebagai upaya untuk mengaitkan China terhadap penyebaran virus Covid-19, dan membentuk narasi kebencian anti-China. Selain menyudutkan China, Donald Trump juga mengeluarkan pernyataan yang turut menyudutkan *World Health Organization* (WHO) dengan menuduh organisasi tersebut dikendalikan oleh China. Tuduhan tersebut dinyatakan oleh Donald Trump sebagai respon temuan investigasi WHO yang tidak menemukan adanya transmisi penularan virus dari manusia ke manusia di China, Donald Trump menyatakan bahwa terdapat informasi kredibel yang menunjukkan adanya transmisi

penyebaran virus pada Desember 2019 (Kessler, 2020). Tuduhan yang disampaikan Donald Trump tersebut tidak hanya menyudutkan posisi China, namun juga turut serta meragukan kredibilitas dan netralitas *World Health Organization*.

Penyebaran virus Covid-19 juga telah menyebabkan timbulnya *xenophobia* seperti sentimen dan sikap rasisme anti-China yang tidak hanya ditujukan kepada Warga Negara China, namun juga pada negara China. Di Indonesia, adanya penyebaran virus Covid-19 menimbulkan sentimen negatif berupa penolakan dan pengusiran yang disertai dengan aksi rasisme terhadap kedatangan Warga Negara China dan keberadaan warga etnis Tionghoa di Indonesia. Sejak awal beredarnya informasi terkait penyebaran virus Covid-19 di China, warganet Indonesia mulai menyerukan penolakan terhadap kunjungan wisatawan asing asal China ke Indonesia, seruan tersebut terus dilakukan secara masif guna menjadi viral sehingga mendapatkan atensi dan respon dari masyarakat dan pemerintah (CNN Indonesia, 2020). Tindakan penolakan terhadap keberadaan Warga Negara China di Indonesia tidak hanya dilakukan melalui media sosial, namun juga melalui aksi demonstrasi yang dilakukan secara langsung. Pada tahun 2020 di Kota Bukit tinggi Sumatera Barat, masyarakat melakukan demonstrasi terhadap keberadaan wisatawan asal China yang menetap di hotel di sekitar wilayah Kota Bukit tinggi, para demonstran meminta bahwa wisatawan tersebut untuk dipindahkan untuk melakukan isolasi di tempat lain seperti Bandar Udara (Emont & Mandhana, 2020). Puncaknya penolakan kedatangan Warga Negara China di Indonesia, pemerintah Indonesia menghentikan sementara kebijakan bebas visa bagi Warga Negara China yang bertempat tinggal di China, upaya penghentian tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 (Detikcom, 2020).

Selain di Indonesia, sentimen dan sikap rasisme anti-China selama masa pandemi dapat ditemukan di berbagai negara lain seperti di India dan beberapa negara di kawasan Afrika seperti Afrika Selatan dan Mesir. Di India, sentimen anti-China berkembang pesat seiring dengan konflik perbatasan India-China yang terus berlangsung, yang kemudian diperburuk dengan adanya penyebaran virus Covid-19 yang dianggap berasal dari China. Di masa pandemi virus Covid-19, Banyak Warga Negara China yang mengalami diskriminasi rasial di India, diskriminasi tersebut ditunjukkan dengan penolakan berbagai hotel terhadap kunjungan wisatawan asal China, bahkan beberapa diantaranya harus diusir secara paksa untuk keluar dari hotel di India (Ruyiao, 2020). Selain aksi rasisme yang ditujukan kepada Warga Negara China, aksi rasisme sentimen anti China bahkan juga dilakukan pada kalangan Warga Negara India yang berasal dari daerah yang berbatasan langsung dengan China, kalangan tersebut memiliki rupa menyerupai Warga Negara China sehingga tidak luput dari aksi diskriminasi sebagai bagian dari sentimen anti China. Warga Negara India yang tinggal di wilayah bagian Timur Laut India menjadi sasaran tindakan aksi diskriminasi rasial yang dilakukan di depan umum, hal tersebut dapat terjadi karena mereka memiliki rupa yang menyerupai dengan rupa Warga Negara China sehingga menjadi sasaran aksi (Banarjee, 2020). Banyak siswa yang berasal dari wilayah bagian Timur Laut India yang mendapatkan berbagai bentuk tindakan pelecehan dan diskriminasi dari siswa lain akibat rupa dan penampilan mereka, tindakan pelecehan dan diskriminasi tersebut dilakukan sebagai respon ketakutan terhadap ancaman penyebaran virus Covid-19 (Ibrar,2020; Kishnan,2020).

Di Afrika Selatan, salah satu reaksi awal pemerintah Afrika Selatan terhadap penyebaran virus Covid-19 adalah dengan membangun pagar sejauh 40 kilometer di sekitar daerah perbatasan dengan Zimbabwe, pemasangan pagar tersebut dilakukan untuk mencegah orang yang telah terinfeksi virus untuk masuk (Moyo & Zanker, 2020). Selain itu, pemerintah Afrika Selatan juga memberlakukan kebijakan pemberian vaksin virus Covid-19 yang bersifat diskriminatif yang dimana vaksinasi hanya akan diberikan kepada Warga Negara Afrika Selatan, kebijakan tersebut akan membuat kalangan rentan menjadi terancam dan membuat virus Covid-19 sulit diatasi (Bordoni, 2020). Sedangkan di Mesir, pada tahun 2020 terdapat insiden dimana seorang supir taksi daring menurunkan secara paksa penumpang yang merupakan Warga Negara China yang dicurigai telah terinfeksi virus Covid-19 dan sang supir menjerit-jerit penumpang tersebut “Kasus Virus Corona Pertama di Mesir!” (Al Sherbini,2020).

Sentimen anti China yang disertai dengan aksi diskriminasi dan rasisme akibat virus Covid-19 juga berlanjut dengan adanya sikap boikot yang diserukan oleh berbagai pihak terhadap berbagai bentuk

produk asal China. Di India, organisasi Konfederasi Seluruh Pedagang India menyerukan masyarakat untuk melakukan boikot terhadap seluruh produk asal China selama musim festival berlangsung, seruan tersebut timbul akibat kerugian besar yang dialami pedagang India akibat pandemi virus Covid-19, seruan tersebut juga dilakukan untuk memulihkan pendapatan pedagang (Business World, 2022). Pemerintah India juga kini telah berupaya untuk membatasi arus impor barang dari China, upaya pembatasan tersebut telah diinisiasi sejak lama namun adanya berbagai rangkaian kejadian seperti konflik di kawasan perbatasan India-China, dan penyebaran virus Covid-19 telah mendorong pemerintah India untuk mempercepat upaya pembatasan tersebut (Basu, 2020).

Dapat dipahami bahwa dalam situasi darurat penyebaran virus Covid-19, situasi kemudian diperburuk dengan adanya penyebaran narasi negatif yang menuding China dianggap sebagai pihak yang menjadi penyebab dan harus bertanggung jawab atas penyebaran virus Covid-19. Penyebaran narasi tersebut telah menyebabkan rusaknya citra negara China dalam ranah global. Rusaknya citra tersebut, kemudian turut berpengaruh pada citra warga negara dan beserta produk asal China yang mendapatkan penolakan di berbagai negara, dan bahkan berdampak pada hubungan bilateral China dengan negara mitra. Situasi ini kemudian dapat memberikan dampak negatif pada berbagai sektor dan turut mempengaruhi posisi China dalam ranah global, oleh karena itu, penting bagi China untuk dapat mengatasi narasi negatif tersebut guna memperbaiki citra China dalam ranah global.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian fenomena yang telah dilakukan sebelumnya, dapat dipahami bahwa adanya penyebaran virus Covid-19 telah menyebabkan rusaknya citra China dalam ranah internasional, hal ini dikarenakan China dianggap sebagai penyebab penyebaran virus Covid-19. Rusaknya citra tersebut dapat menyebabkan efek domino pada berbagai sektor lainnya, oleh karena itu China harus melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji bagaimana China berupaya untuk memperbaiki citra negaranya melalui praktik diplomasi publik yang dilakukan di masa pandemi, oleh karena itu rumusan yang dibahas dalam penelitian ini adalah “Bagaimana praktik diplomasi publik yang dilakukan oleh China di masa pandemi untuk memperbaiki citra China?”.

Diplomasi Publik

Dalam penelitian ini, salah satu teori yang digunakan untuk membahas fenomena penelitian adalah teori Diplomasi Publik. Definisi diplomasi publik menurut Kamus Hubungan Internasional menjelaskan diplomasi publik sebagai usaha negara untuk mempengaruhi opini publik di negara lain dengan menggunakan berbagai bentuk instrumen seperti film, pertukaran budaya, radio dan televisi (U.S Departement of State, 1987). Manheim (1990) mengemukakan definisi lain dari diplomasi publik sebagai usaha untuk mempengaruhi opini dari publik atau pemimpin negara dengan tujuan untuk mewujudkan tujuan kebijakan luar negeri dari negara tersebut. Berdasarkan dua definisi tersebut, dapat ditemukan kesamaan pandangan terhadap diplomasi publik yaitu praktik diplomasi yang dilakukan sebagai upaya untuk mempengaruhi opini sesuai dengan tujuan dari negara tersebut, dengan menggunakan berbagai instrumen yang dapat mendukung upaya mempengaruhi opini.

Perbedaan praktik diplomasi publik dengan diplomasi tradisional dapat terlihat dari aktor yang dilibatkan serta target tujuan praktik diplomasi. Praktik diplomasi tradisional, dilakukan dengan menggunakan representasi perwakilan negara di negara target dan diplomasi dilakukan melalui jalur resmi, sedangkan diplomasi publik berfokus pada publik di negara lain dan dalam praktiknya turut melibatkan aktor lain selain negara dalam hubungan yang kadang tidak resmi (Gregory, 2008). Berdasarkan pemahaman tersebut, praktik diplomasi publik dapat dilakukan lebih fleksibel dibandingkan praktik diplomasi tradisional, sehingga praktik diplomasi publik dapat lebih mudah untuk dilakukan. Anholt (2006) membagi perkembangan diplomasi publik terbagi kedalam tiga tahap, diantaranya adalah:

Tahap pertama, para pelaku diplomasi publik menempati posisinya dalam pemerintahan untuk menentukan pilihan kebijakan yang dapat diambil

Tahap kedua, meskipun fungsi para aktor masih bersifat mendasar untuk menjual kebijakan negara, namun lingkup para aktor ini meningkat dan memiliki kewenangan untuk mengatur kondisi dan bentuk penyampaian isi kebijakan luar negeri

Tahap terakhir adalah penggunaan diplomasi publik sebagai alat kebijakan luar negeri secara formal atau informal

Peneliti mengidentifikasi pemulihan citra negara sebagai narasi strategis dalam arah kebijakan luar negeri China di masa pandemi virus Covid-19. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji diplomasi publik sebagai sarana pemerintah China untuk memperbaiki citra China di masa pandemi virus Covid-19, yang sebelumnya telah rusak akibat penyebaran narasi negatif di berbagai negara yang mengaitkan China dengan penyebaran virus Covid-19, rusaknya citra China tersebut kemudian menghasilkan efek domino yang merugikan China pada berbagai sektor. Diplomasi publik merupakan bagian dari *nation branding*, yang dimana dalam praktiknya dapat dilakukan untuk mengkonstruksi citra negara. Lewis (2003) berpendapat bahwa diplomasi publik sebagai strategi pencitraan dari para politisi. Van ham (2001, 2002, 2003, 2008) menempatkan pencitraan sebagai basis teoritis aliran konstruktivis dalam hubungan internasional karena memberikan kesempatan bagi negara untuk mengkonstruksi citra mereka, peran, dan identitas, serta memberi penekanan pada norma dan nilai.

Dalam penelitian ini, peneliti menempatkan *nation branding* dengan diplomasi publik sebagai sesuatu yang berbeda namun saling memiliki keterkaitan. *Nation branding* dapat menjadi narasi strategis yang mempengaruhi orientasi arah praktik diplomasi publik yang dilakukan dengan menggunakan berbagai bentuk instrumen untuk membentuk citra positif negara sehingga kemudian mempengaruhi opini pihak lain terhadap negara tersebut. *Nation branding* yang dilakukan melalui praktik diplomasi publik, dapat membentuk citra dan narasi positif yang berfungsi sebagai kontra narasi terhadap arus narasi negatif yang berdampak negatif terhadap citra negara tersebut.

Narasi Strategis

Selain diplomasi publik, teori atau konsep lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah narasi strategis. Narasi strategis didefinisikan sebagai konstruksi pesan yang mengandung berbagai bentuk makna, pesan tersebut dapat disampaikan secara verbal atau simbolis untuk kemudian disampaikan untuk mempengaruhi audiens yang menjadi target. Teori framing yang dikemukakan oleh Entman (1993) menjelaskan bahwa aktor negara berupaya untuk membangun hubungan dengan audiens asing melalui penyebaran pesan yang dirancang secara sengaja, atau serangkaian pesan yang dibuat dari berdasarkan pandangan individu. Namun menurut Golan dkk (2018) setiap narasi strategis yang disampaikan harus mampu bersaing dengan pesan dari audiens negara domestik serta narasi asing lainnya yang diperkenalkan sebagai fungsi dari politik kekuasaan.

Dapat dipahami bahwa terdapat persaingan pesan, yang dimana dalam setiap pesan terdapat makna yang telah dikonstruksikan oleh aktor. Dalam penelitian ini, narasi strategis dielaborasi dengan diplomasi publik untuk menjelaskan bagaimana pesan yang mengandung narasi strategis, dapat disampaikan para aktor melalui praktik diplomasi publik dengan menggunakan berbagai instrumen yang mengandung *smart power* yang dimiliki China, sehingga pesan tidak hanya dengan mudah dipahami, namun juga dapat mempengaruhi aktor lain yang menjadi target. Narasi strategis untuk memperbaiki citra China dalam ranah internasional di masa pandemi virus Covid-19, disampaikan menggunakan *smart power* China yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi kebutuhan negara target sehingga pesan tersebut dapat tersampaikan.

Penelitian Terdahulu

Penelitian ini meneliti bagaimana praktik diplomasi yang dilakukan untuk mempromosikan citra positif negara, dalam mengkaji penelitian terdahulu, peneliti menggunakan metode diskursif dengan mengkaji penelitian terdahulu berdasarkan teoretis dan fenomena penelitian, untuk kemudian mengidentifikasi *research gap* guna menemukan kebaharuan penelitian sehingga dapat berkontribusi terhadap ilmu hubungan internasional khususnya pada kajian terkait diplomasi publik dan politik luar negeri. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan keterkaitan diplomasi publik

dengan upaya untuk mempromosikan citra negara. Penelitian Pammet (2014) dan Dolea (2015) menunjukkan bagaimana diplomasi publik menjadi sarana *nation branding* dengan mempromosikan citra positif negara, praktik diplomasi publik dalam membangun atau membentuk citra positif negara dapat dilakukan melalui kampanye yang dilaksanakan berdasarkan agenda aktor pelaku diplomasi. Terkait narasi strategis yang disampaikan dalam praktik diplomasi publik, beberapa penelitian menunjukkan bahwa agenda politik aktor pelaku diplomasi publik dapat diidentifikasi dalam narasi yang disampaikan dalam instrumen yang digunakan dalam praktik diplomasi publik, narasi tersebut merupakan narasi strategis yang merefleksikan kepentingan dan agenda politik yang berusaha disampaikan aktor pelaku melalui praktik diplomasi publik. Penelitian Natarajan (2014), Pamment (2014) dan Golan dkk (2018) menjelaskan pada instrumen yang digunakan dalam praktik diplomasi publik dapat merefleksikan narasi strategis dari aktor pelaku tersebut, narasi strategis tersebut sebelumnya telah dibentuk dan disesuaikan dengan kepentingan dan agenda aktor, narasi strategis yang disampaikan melalui instrumen diplomasi publik diharapkan dapat mempengaruhi pikiran, persepsi dan pandangan aktor lainnya.

Terkait fenomena penelitian, telah terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan praktik diplomasi publik yang dilakukan oleh China pada masa pandemi virus Covid-19. Penelitian Xia (2020), Jerdén dkk (2021) menunjukkan bahwa praktik diplomasi publik yang dilakukan oleh China berubah ketika di masa pandemi virus Covid-19 dari yang sebelumnya bersifat agresif berubah menjadi pasif, diplomasi publik China di masa pandemi virus Covid-19 dilakukan untuk mempertahankan citra positif China dihadapan masyarakat internasional, upaya tersebut dilakukan agar kepentingan China dalam lingkungan internasional dapat terjaga. Berdasarkan uraian beberapa penelitian terdahulu tersebut dapat dipahami bahwa praktik diplomasi publik yang dilakukan oleh China di masa pandemi virus Covid-19 memiliki narasi strategis yaitu pencitraan positif China untuk memperbaiki citra positif China pasca upaya labelisasi China dengan virus Covid-19. Peneliti menemukan *research gap* bahwa belum ada penelitian yang menunjukkan bentuk instrumen diplomasi publik yang digunakan China, dan bagaimana instrumen tersebut dapat mendukung praktik diplomasi publik China secara efektif. Dengan menggunakan diplomasi publik yang dielaborasi dengan narasi strategis, peneliti mengkaji praktik diplomasi publik yang dilakukan oleh China di masa pandemi untuk memperbaiki citra China, dan bagaimana instrumen diplomasi publik yang digunakan dapat mendukung praktik diplomasi publik yang dilakukan.

Bantuan Ekonomi dan Alat Kesehatan Sebagai Instrumen Diplomasi Publik China di Masa Pandemi

Peneliti menemukan bahwa diplomasi publik yang dilakukan China untuk memperbaiki citra di masa pandemi virus Covid-19 dilakukan dengan menggunakan vaksin, alat kesehatan, dan bantuan ekonomi sebagai instrumen diplomasi publik China ke berbagai negara mitra. Beberapa instrumen tersebut merupakan jenis *smart power* yang merupakan gabungan dari *soft power* dan *hard power* yang memiliki kekuatan atraksi tersendiri yang dapat digunakan untuk mempengaruhi aktor lain. Nye (2008) mendefinisikan *soft power* sebagai kekuatan yang dapat digunakan untuk mempengaruhi aktor lain, upaya untuk mempengaruhi aktor lain dapat dilakukan dengan menggunakan kekuatan atraksi untuk menciptakan suatu ketertarikan sehingga membuat aktor lain untuk mengikuti keinginan aktor pelaku.

Berbeda dengan jenis *soft power* yang mengandalkan kekuatan atraksi untuk mempengaruhi aktor lain guna mengikuti keinginan pelaku, jenis *hard power* menekankan pada upaya memaksa atau pengancaman untuk mempengaruhi aktor lain, paksaan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan kekuatan militer atau pembayaran utang sehingga aktor lain dapat mengikuti keinginan pelaku meskipun secara terpaksa. Secara umum, kekuatan atraksi dalam *soft power* dapat ditemukan dalam berbagai bentuk produk budaya populer seperti tayangan televisi, konten musik, konten media sosial, pertunjukan budaya, olahraga, dan berbagai bentuk produk budaya populer lainnya. Berbagai produk budaya populer memiliki kekuatan atraksi tersendiri sebagai *soft power* yang digunakan sebagai instrumen dalam praktik diplomasi publik, 1). karena memiliki daya tarik atau keunikan tersendiri, 2). telah dikenal atau populer dikalangan masyarakat, 3). mudah untuk ditemui atau

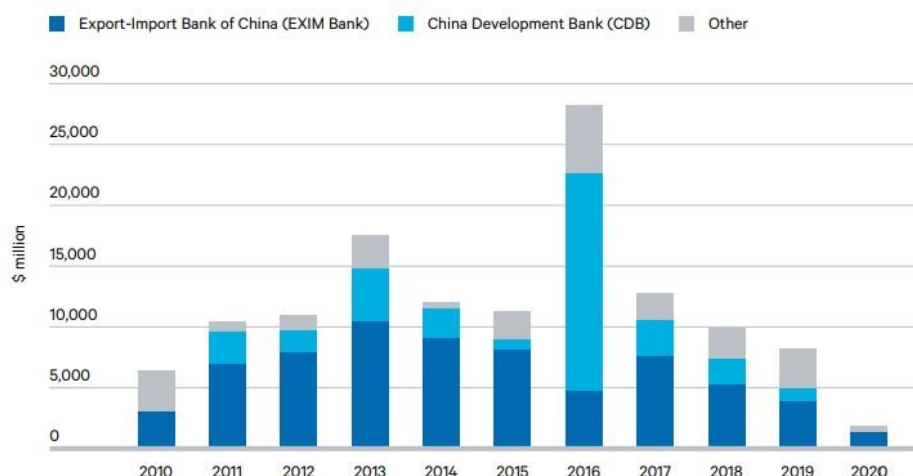
diakses. Dengan adanya kekuatan atraksi tersebut, penggunaan budaya populer sebagai instrumen dalam praktik diplomasi publik akan mempermudah upaya aktor untuk mempengaruhi aktor lainnya, karena budaya populer memiliki kekuatan atraksi yang membuat *soft power* tersebut efektif dalam mempengaruhi aktor lainnya.

Akan tetapi, seiring dengan perkembangannya, kini praktik diplomasi publik tidak terbatas hanya pada penggunaan jenis produk budaya populer sebagai instrumen, namun dapat menggunakan berbagai bentuk instrumen lainnya yang mengandung *soft power* yang dapat digunakan aktor pelaku untuk mempengaruhi aktor lain. Contoh bentuk instrumen yang dapat digunakan dalam praktik diplomasi publik adalah bantuan alat kesehatan dan vaksin, beberapa instrumen tersebut memiliki kekuatan atraksi tersendiri yang dapat digunakan dalam praktik diplomasi publik. Terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan penggunaan bantuan ekonomi dalam bentuk bantuan asing atau bantuan luar negeri sebagai instrumen dalam praktik diplomasi publik. Penelitian Blair (2021) menunjukkan bagaimana China menggunakan bantuan luar negeri yang digunakan sebagai instrumen dalam praktik diplomasi publik China di kawasan Afrika, adanya kebutuhan negara-negara Afrika terhadap bantuan ekonomi membuat bantuan ekonomi yang digunakan sebagai *soft power* oleh China mudah untuk diterima oleh negara-negara di kawasan Afrika.

Penelitian Divkolaye dkk (2016) menjelaskan bahwa diplomasi kesehatan merupakan deviasi dari diplomasi publik yang menggunakan pelayanan kesehatan sebagai instrumen, adanya kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan membuat instrumen yang digunakan dalam praktik diplomasi dapat diterima oleh pihak lawan sehingga tujuan diplomasi aktor pelaku dapat terpenuhi. Selain menggunakan instrumen yang mengandung *soft power*, praktik diplomasi publik juga dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen yang mengandung *hard power* yang dimana penggunaan instrumen tersebut dielaborasi dengan instrumen *soft power* menjadi suatu instrumen yang mengandung kekuatan *smart power*. Penelitian Nye (2008) dan Wilson (2008) menjelaskan bahwa *soft power* dan *hard power* dapat dielaborasi menjadi satu dalam bentuk *smart power* yang kemudian dapat digunakan untuk mewujudkan kepentingan aktor melalui praktik diplomasi publik. Berdasarkan uraian beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat dipahami bahwa praktik diplomasi publik dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai bentuk instrumen, penggunaan instrumen harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi kebutuhan aktor lain, sehingga dapat lebih mudah untuk diterima.

Diplomasi Bantuan Ekonomi China di Masa Pandemi Virus Covid-19

Salah satu bentuk diplomasi yang dilakukan oleh China pada masa pandemi virus Covid-19, dilakukan dengan menggunakan bantuan ekonomi sebagai instrumen. Sebelumnya China telah menggunakan bantuan ekonomi sebagai instrumen diplomasi publik pada beberapa negara di kawasan Afrika, bantuan ekonomi tersebut dikemas dalam bentuk utang luar negeri yang digunakan untuk pembiayaan berbagai bentuk proyek pembangunan di negara-negara kawasan Afrika. Berikut adalah jumlah komitmen pinjaman China kepada negara-negara di kawasan Afrika berdasarkan lembaga penyalur pinjaman:



Bagan 1: Komposisi Jumlah Komitmen Pinjaman China Kepada Negara-Negara di Kawasan Afrika
Vines dkk (2022).

Sumber : <http://bu.edu/gdp/chinese-loans-to-africa-database>.

Berdasarkan data lembaga penyalur pinjaman, menunjukkan setiap tahunnya negara-negara di kawasan Afrika mendapatkan bantuan ekonomi dalam bentuk pinjaman dari China. Beberapa negara di kawasan Afrika yang telah memiliki komitmen pinjaman dengan China diantaranya adalah Nigeria, Kenya, Zambia dan Afrika Selatan yang dimana pinjaman tersebut digunakan untuk membiayai program pembangunan di berbagai sektor. Berdasarkan data dari kantor manajemen utang Nigeria, utang Nigeria kepada China per 30 Juni 2022 menyumbang 83,57 persen dari total utang bilateral dengan nominal mencapai \$3,9 miliar, jumlah tersebut meningkat 12,7 persen dari jumlah \$3,5 miliar pada periode yang sama tahun lalu (Olawoyin, 2022). Kenya juga merupakan negara yang memiliki utang dengan China, yang dimana selama tahun 2000 hingga 2020 lembaga pemberi utang China telah berkomitmen untuk memberikan utang dengan jumlah \$9,3 miliar, jumlah utang tersebut hampir menyamai 70% *Gross Domestic Products* (GDP) Kenya (Reuters, 2022). Berdasarkan data pemerintah Zambia, China adalah salah satu kreditur utang Zambia yang dimana utang Zambia ke China mencapai nominal \$17,27 miliar yang dimana nominal tersebut sejumlah sepertiga utang internasional Zambia (Rosario & Savage, 2022). Sedangkan Afrika Selatan memiliki utang kepada China dengan nominal empat persen dari rata-rata nilai *Gross Domestic Product* Afrika Selatan (Milss & Merwe, 2020).

Penggunaan bantuan ekonomi dalam bentuk utang tersebut dapat dengan mudah diterima oleh berbagai negara di kawasan Afrika. Bantuan ekonomi tersebut mengandung *hard power* yang memiliki kekuatan atraksi tersendiri yang membuat bantuan tersebut mudah untuk diterima, yaitu adanya kesiapan dan kemudahan dalam pemberian (Eyssen, 2018). Selain itu, kondisi berbagai negara di kawasan Afrika yang membutuhkan pendanaan untuk mendukung percepatan pembangunan, membuat bantuan ekonomi yang diberikan oleh China dapat diterima dengan mudah. Dengan diterimanya instrumen diplomasi publik oleh aktor target, maka akan mempermudah China sebagai aktor pelaku diplomasi publik untuk menyampaikan pesan atau bahkan mempengaruhi negara-negara di kawasan Afrika sebagai aktor target praktik diplomasi publik. Hal tersebut juga menunjukkan keberhasilan China dalam memilih instrumen yang digunakan dalam praktik diplomasi publik, setiap instrumen mengandung *soft power* tersendiri namun instrumen harus dipilih sesuai dengan situasi dan kondisi aktor target, sehingga penggunaan instrumen dapat mendukung efektivitas praktik diplomasi publik.

Pada masa pandemi virus Covid-19, China kembali menggunakan bantuan ekonomi sebagai instrumen diplomasi publik, bantuan ekonomi tersebut dikemas dalam bentuk keringanan utang melalui kebijakan restrukturisasi utang. Pada masa pandemi virus Covid-19, China dianggap sebagai sumber masalah yang menyebabkan banyak negara mengalami kesulitan, tidak hanya akibat penyebaran virus Covid-19 yang diasosiasikan dengan China, namun juga diakibatkan oleh utang yang diberikan China ke berbagai negara mitra (Nyabiage, 2022). Negara-negara di kawasan Afrika yang telah memiliki komitmen utang kepada China sebelumnya, kini dihadapkan pada kesulitan dalam pembayaran utang, kesulitan tersebut diakibatkan oleh kondisi ketidakpastian ekonomi di masa pandemi virus Covid-19.

Banyak pihak menuding bahwa salah satu pihak yang turut berperan terhadap kondisi ketidakpastian ekonomi yang dialami oleh banyak negara di kawasan Afrika Selatan adalah China, hal ini dikarenakan bantuan ekonomi dalam bentuk utang luar negeri yang diberikan China justru membebani perekonomian negara debitur. Pada masa pandemi virus Covid-19, negara-negara di kawasan Afrika tidak hanya dihadapkan pada kesulitan ekonomi akibat pandemi virus Covid-19 yang mendisrupsi berbagai kegiatan ekonomi, namun juga harus dihadapkan pada kewajiban pembayaran utang luar negeri. Merespon kesulitan negara debitur, pemerintah China kemudian memberlakukan kebijakan pengampunan pajak utang kepada negara-negara di kawasan Afrika sebagai negara debitur. Pada tahun 2021, Presiden China Xi Jinping dalam Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) mengumumkan bahwa China telah memberikan pengampunan bunga terbadap 23 pinjaman kepada 17 negara di kawasan Afrika (Savage, 2022).

Dapat dipahami bahwa pengampunan pajak utang merupakan bentuk bantuan ekonomi yang dijadikan sebagai instrumen yang digunakan dalam praktik diplomasi publik China di kawasan Afrika khususnya pada negara-negara debitur hutang luar negeri China. Adanya kesulitan perekonomian dan pembayaran utang, membuat pengampunan pajak utang menjadi *hard power* yang memiliki kekuatan atraksi untuk mempengaruhi negara-negara di kawasan yang merupakan debitur hutang luar negeri China. Pemberian pengampunan bunga utang merupakan bentuk diplomasi publik untuk menegaskan narasi negatif yaitu China sebagai penyebab kesulitan yang dialami negara-negara Afrika di masa pandemi, dan juga sebagai bentuk upaya untuk membentuk citra positif China dalam ranah internasional guna menjaga timbulnya pandangan negatif masyarakat internasional terhadap China.

Diplomasi Vaksin dan Alat Kesehatan China

Selain praktik diplomasi publik yang dilakukan dengan menggunakan bantuan ekonomi sebagai instrumen, praktik diplomasi publik yang dilakukan China di masa pandemi virus Covid-19 juga menggunakan vaksin dan alat kesehatan sebagai instrumen. Virus Covid-19 memiliki tingkat infeksi yang tinggi karena dapat ditransmisikan dari manusia ke manusia lainnya, hal tersebut membuat penyebaran virus Covid-19 dapat menyebar dengan cepat dan cenderung sulit untuk dikendalikan. Dengan penyebaran virus yang masif dan dapat menyebar dengan cepat, membuat penanganan virus Covid-19 menjadi sulit untuk dilakukan. Ketersediaan vaksin dan alat kesehatan tidak mampu memenuhi kebutuhan pasien infeksi virus Covid-19 yang terus bertambah setiap harinya, kondisi tersebut membuat banyak pasien infeksi Covid-19 tidak dapat tertangani dengan baik dan bahkan harus meninggal dunia.

Dengan kondisi perekonomian negara yang sulit akibat dampak penyebaran virus Covid-19, pengadaan vaksin dan alat kesehatan untuk menunjang penanganan infeksi virus Covid-19 menjadi sulit untuk dilakukan, situasi ini kemudian mempersulit upaya penanganan kasus infeksi virus Covid-19. Kondisi kebutuhan berbagai negara terhadap vaksin dan alat kesehatan untuk menunjang penanganan kasus infeksi virus Covid-19 kemudian dimanfaatkan oleh China dengan menawarkan bantuan vaksin dan alat kesehatan melalui upaya diplomasi yang dilakukan secara bilateral kepada negara-negara mitra. China sendiri telah berhasil mengembangkan dan memproduksi vaksin Covid-19 secara massal melalui perusahaan farmasi domestik yaitu Sinovac dan Sinopharm. Vaksin yang dikembangkan oleh perusahaan Sinovac dan Sinopharm sama-sama menggunakan virus yang telah dimatikan menggunakan proses kimiawi, namun meskipun telah dimatikan materi genetik virus tetap dapat terdeteksi oleh sistem imun sehingga antibodi akan membentuk kekebalan terhadap virus Covid-19 atau SARS-CoV-2 (Syahrial, 2021). Namun vaksin yang dikembangkan dan diproduksi oleh Sinovac dan Sinopharm memiliki tingkat efektivitas yang berbeda, dan tidak menjamin 100% efektif dalam menangkal infeksi virus Covid-19. Selain berhasil mengembangkan dan memproduksi vaksin Covid-19, perusahaan domestik China juga telah berhasil mengembangkan dan memproduksi alat kesehatan penunjang penanganan kasus infeksi virus Covid-19 seperti Ventilator secara masif. Perusahaan produsen Ventilator asal China merupakan pemasok kebutuhan Ventilator untuk memenuhi kebutuhan dalam pasar global, perusahaan tersebut memiliki kapasitas produksi yang besar dan terus dikembangkan guna memenuhi permintaan Ventilator yang terus meningkat seiring dengan kasus infeksi virus Covid-19 yang terus bertambah (Yibing & Hao, 2020). Adanya ketersediaan vaksin Covid-19 dan alat kesehatan seperti Ventilator, menjadi suatu sumber daya atau modal China dalam melakukan penanganan penyebaran virus Covid-19. Selain itu, ketersediaan tersebut membuat China dapat menjadikan vaksin Covid-19 dan alat-alat kesehatan sebagai suatu instrumen diplomasi kepada negara-negara mitra. China telah memberikan bantuan vaksin dan alat kesehatan ke banyak negara mitra, beberapa negara mitra yang telah menerima bantuan tersebut diantaranya adalah Indonesia, Vietnam, Malaysia, dan Nigeria.

Pemerintah China telah memberikan rangkaian bantuan vaksin Covid-19 dan berbagai bentuk alat kesehatan kepada pemerintah Indonesia, dan China juga telah mendukung pengembangan dan produksi vaksin Covid-19 di Indonesia, pemberian bantuan tersebut merupakan upaya pemerintah China dalam mendukung penanganan penyebaran virus Covid-19 di Indonesia (Wardah, 2021). Di

Vietnam, pemerintah Vietnam mengumumkan bahwa pemerintah China akan memberikan 3 juta dosis vaksin kepada Vietnam pada akhir tahun 2021, pemberian vaksin tersebut semakin menambah jumlah total pemberian vaksin Covid-19 oleh China ke berbagai negara di kawasan Asia Tenggara dengan jumlah total 5,7 juta dosis vaksin (Reuters, 2021). Di Malaysia, pemerintah China telah berkomitmen untuk memasok vaksin, alat kesehatan, dan tenaga medis guna memenuhi kebutuhan di Malaysia, kehadiran bantuan pasokan tersebut mendapatkan apresiasi positif di Malaysia karena dapat membantu ketersediaan untuk membantu penanganan penyebaran virus Covid-19 di Malaysia (Chang, 2021). Pada tahun 2021, pemerintah China mengumumkan pemberian donasi vaksin Covid-19 kepada Nigeria dengan jumlah 470.000 dosis vaksin, pemberian donasi tersebut didasari oleh hubungan baik China dengan Nigeria dan pemerintah China juga meminta waspada terhadap politisasi isu penyebaran virus Covid-19 untuk menyudutkan China (Nan, 2021).

Diplomasi vaksin dan alat kesehatan yang dilakukan oleh China kemudian berubah menjadi suatu kontestasi geopolitik dengan kehadiran Amerika Serikat dan India yang juga turut melakukan praktik diplomasi publik dengan menggunakan vaksin dan alat kesehatan sebagai instrumen. Amerika Serikat berkompetisi dengan China dalam praktik diplomasi vaksin dan alat kesehatan di beberapa wilayah seperti Vietnam (Tung, 2022), kawasan Timur Tengah (Dhyani, 2022), Amerika Latin dan Karibia (Avila dkk, 2022) Partisipasi Amerika Serikat dalam diplomasi vaksin dan alat kesehatan, dapat dipahami sebagai upaya untuk menegasikan upaya China dalam membentuk citra positif melalui praktik diplomasi publik menggunakan vaksin dan alat kesehatan sebagai instrumen, sekaligus upaya untuk mencegah China dalam memperluas pengaruhnya dalam ranah global. Dapat dipahami bahwa Amerika Serikat dan India yang juga turut serta melakukan praktik diplomasi publik dengan menggunakan vaksin dan alat kesehatan sebagai instrumen, menunjukkan adanya upaya untuk mencegah China dalam menyebarluaskan pengaruhnya di dunia. Sedangkan praktik diplomasi vaksin dan alat kesehatan yang dilakukan oleh India, dilakukan dengan pemberian bantuan vaksin Covid-19 dan berbagai alat kesehatan kepada negara-negara yang memiliki kedekatan wilayah dengan India seperti Afganistan, Banglades, Pakistan, Sri Lanka, Bhutan, Maldives, Myanmar dan Nepal (Singh dkk, 2022). Marshal dan Lee (2021) berpendapat bahwa praktik diplomasi vaksin yang dilakukan oleh India, merupakan bentuk upaya India untuk melawan China untuk memperluas hubungan luar negeri di tengah konflik teritorial antar kedua negara.

Dapat dipahami bahwa praktik diplomasi publik yang dilakukan China dengan menggunakan vaksin Covid-19 dan alat kesehatan dapat menunjukkan kebaikan dan niat China untuk membantu berbagai negara dalam penanganan pandemi virus Covid-19. Melalui praktik diplomasi publik tersebut, juga dapat membentuk citra positif China dalam ranah global, yang dimana citra positif tersebut dapat membantu menegasikan narasi negatif yang mengaitkan dan menyalahkan China atas penyebaran virus Covid-19 beserta berbagai dampak yang ditimbulkan. Vaksin Covid-19 dan alat kesehatan merupakan instrumen yang mengandung kekuatan *soft power* yang memiliki kekuatan atraktif, adanya kebutuhan terhadap vaksin Covid-19 dan alat kesehatan kemudian mendorong aktor lainnya dalam hal ini adalah negara mitra China dapat dengan mudah menerima bantuan vaksin dan alat kesehatan yang digunakan sebagai instrumen diplomasi oleh China.

Penutup

Dapat dipahami bahwa praktik diplomasi publik yang dilakukan oleh China di masa pandemi virus Covid-19 untuk memperbaiki citra China dilakukan dengan menggunakan dua instrumen yaitu bantuan ekonomi dan bantuan vaksin dan alat kesehatan yang merupakan bentuk *hard power* dan *soft power* yang dielaborasi menjadi *smart power*. Bantuan ekonomi yang diberikan oleh China dikemas dalam bentuk pengampunan bunga utang, yang dimana bantuan tersebut diberikan kepada negara-negara debitur guna meringankan beban ekonomi mereka di masa pandemi virus Covid-19. Sedangkan diplomasi vaksin dan alat kesehatan yang dilakukan oleh China dilakukan dengan memberikan bantuan vaksin Covid-19 dan alat kesehatan yang dibutuhkan oleh negara mitra untuk mendukung penanganan penyebaran virus Covid-19 di negara masing-masing. Baik diplomasi bantuan ekonomi maupun diplomasi vaksin dan alat kesehatan yang dilakukan China dapat dilakukan dengan baik, hal ini dikarenakan instrumen yang digunakan dalam praktik diplomasi tersebut dapat diterima karena telah menjadi kebutuhan di negara mitra.

Dalam setiap penggunaan instrumen tersebut, pemerintah China turut menyertakan pesan diplomatik baik secara tersirat maupun tersurat, pesan yang disampaikan menunjukkan itikad baik China untuk membantu penanganan penyebaran virus Covid-19. Pesan tersebut merupakan bagian dari narasi strategis yang berusaha disampaikan oleh pemerintah China untuk memperbaiki citra serta menjaga pengaruh China dalam lingkup internasional. Namun penelitian ini menemukan bahwa praktik diplomasi publik yang dilakukan oleh China untuk memperbaiki citra China dihadapkan pada tantangan kompetisi dari negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan India yang berupaya untuk berkompetisi dengan China untuk memperluas pengaruh dalam ranah global.

Referensi

- Al Sherbini, Ramadan (2020). Driver jailed for dumping Chinese man on highway over virus fears in Egypt. <https://gulfnews.com/world/mena/driver-jailed-for-dumping-chinese-man-on-highway-over-virus-fears-in-egypt-1.1584007723426>
- Anholt, S (2006). Public Diplomacy and place branding: Where's the link?(editorial), in Simon Anholt (ed) Place Branding 2, Palgrave Mc Millan, halaman. 271-275
- Avila dkk (2022). US-China vaccine diplomacy: Lessons from Latin America and the Caribbean. Atlantic Council Adrinne Arsht Latin America Center ISBN 13: 9781619772151
- Banarjee, S (2020). People from north eastern States face racism, 'Chinese' slur in Pune. <https://www.thehindu.com/news/national/other-states/people-from-north-eastern-states-face-racism-chinese-slur-in-pune/article31035275.ece>
- Basu, Nayanima (2020). India working to restrict Chinese goods, investments since before Galwan, Covid: Officials. <https://theprint.in/diplomacy/india-working-to-restrict-chinese-goods-investments-since-before-galwan-covid-officials/445017/>
- Blair, R., Marty, R. & Roessler, P. (2022). Foreign Aid and Soft Power: Great Power Competition in Africa in the Early Twenty-first Century. *British Journal of Political Science*, 52(3), 1355-1376. doi:10.1017/S0007123421000193
- Bordoni, L (2020). South Africa: Xenophobia and corruption threaten fair and effective distribution of covid vaccine. <https://www.vaticannews.va/en/church/news/2021-02/covid-vaccine-jrs-jesuit-institute-south-africa-equitable-respon.html>
- Business World (2022). CAIT Urges People To Boycott Chinese Goods In This Festive Season. <https://www.businessworld.in/article/CAIT-Urges-People-To-Boycott-Chinese-Goods-In-This-Festive-Season-/02-09-2022-444947/>
- Chang, P.T.C (2021). China's Vaccine Diplomacy in Malaysia: Problems and Prospects. *Perspective ISSUE: 2021 No. 121 ISSN 2335-6677*
- CNN Indonesia (2020). Netizen Tolak Masuk Turis China Karena Corona Jadi Trending. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200126131609-192-468789/netizen-tolak-masuk-turis-china-karena-corona-jadi-trending>.
- Detikcom (2020). Ramai-ramai Dunia Tolak Turis China Gegara Virus Corona. <https://news.detik.com/berita/d-4882978/ramai-ramai-dunia-tolak-turis-china-gegara-virus-corona>.
- Dhyani, A (2022). U.S. and China Vaccine Diplomacy in the MENA region. <https://moderndiplomacy.eu/2022/11/07/u-s-and-china-vaccine-diplomacy-in-the-mena-region/>
- Divkolaye, N.S.H. Radfar, M. Seighali, F & Burkle, F. (2016). When Health Diplomacy Serves Foreign Policy: Use of Soft Power to Quell Conflict and Crises. *Disaster Medicine and Public Health Preparedness*, 10(5), 724-727. doi:10.1017/dmp.2016.31
- Emont, J. Mandhana, N (2020). "Chinese Abroad Become Targets of Suspicion Over Coronavirus". <https://www.wsj.com/articles/chinese-abroad-become-targets-of-suspicion-over-coronavirus-11580659771>. *The Wall Street Journal*. ISSN 0099-9660
- Entman, R. M (1993). "Framing: Toward Clarification on a Fractured Paradigm." *Journal of Communication* 43 (4): 51-58.

- Eyssen, B.V (2018). China is Africa's ready and easy lender. <https://www.dw.com/en/double-debt-risk-for-african-countries-that-turn-to-china/a-44819336>
- Golan, G.J. Phillip, C. Arceneaux & Soule, M (2018): The Catholic Church as a public diplomacy actor: an analysis of the pope's strategic narrative and international engagement, *The Journal of International Communication*, DOI: 10.1080/13216597.2018.1517657
- Gregory, Bruce, 2008, *Public Diplomacy : The Sunrise of an Academic Field*, *The ANNALS of The American Academy of Political and Social Science*, accessed on December 28th, 2009, <http://ann.sagepub.com/cgi/content/abstract/616/1/274>
- Ibrar, M (2020). Students from Northeast complain of Racism at Kimori Mal College. <https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/students-from-northeast-complain-of-racism-at-kmc/articleshow/74071475.cms>
- Kessler, Glenn (2020). Trump's false claim that the WHO said the coronavirus was 'not communicable'. <https://www.washingtonpost.com/politics/2020/04/17/trumps-false-claim-that-who-said-coronavirus-was-not-communicable/>
- Krishnan, M (2020). 'Chinese-looking' Indians targeted in racist attacks. <https://www.dw.com/en/coronavirus-chinese-looking-indians-targeted-in-racist-attacks/a-52956212>
- Lewis, E. (2003) 'Branding war and peace' *Brand Strategy* January 2003 halaman 26-28.
- Mangan, D (2020). Trump blames China for coronavirus pandemic: 'The world is paying a very big price for what they did'. <https://www.cnbc.com/2020/03/19/coronavirus-outbreak-trump-blames-china-for-virus-again.html>
- Manheim, J.B (1990). *Strategic Public Diplomacy: The Evolution of Influence*, Oxford University Press, New York
- Mashal M, Yee V (2021) The newest diplomatic currency: COVID-19 vaccines. Available at: <https://www.nytimes.com/2021/02/11/world/asia/vaccine-diplomacy-india-china.html>
- Mills, G & Merwe, E.V.D (2020). Will we see a post-Covid China-Africa reset? <https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-04-30-will-we-see-a-post-covid-china-africa-reset/>
- Moyo, K & Zanker, F (2020). South Africa's xenophobic agenda is impeding its coronavirus response. <https://africanarguments.org/2020/04/09/south-africa-coronavirus-xenophobic-agenda-impeding-response/>
- Nan (2021). COVID-19: China donates 470,000 doses of vaccine to Nigeria. <https://guardian.ng/news/covid-19-china-donates-470000-doses-of-vaccine-to-nigeria/>
- Nyabiage, J (2022). China – the reluctant debt relief leader in a debt-distressed world. <https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3202956/china-reluctant-debt-relief-leader-debt-distressed-world>
- Nye, J. S. (2008). *Public Diplomacy and Soft Power*. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 616(1), 94–109. <https://doi.org/10.1177/0002716207311699>
- Olawoyin, O (2022). China accounts for 66% debt-service payments by Nigeria, other IDA countries in 2022 – World Bank. <https://www.premiumtimesng.com/news/top-news/569564-china-accounts-for-66-debt-service-payments-by-nigeria-other-ida-countries-in-2022-world-bank.html>
- Reuters (2021). Vietnam says China to donate 3 mln more coronavirus vaccines. <https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/vietnam-says-china-donate-3-mln-more-coronavirus-vaccines-2021-09-10/>
- Reuters (2022). Kenya publishes loan documents for Chinese-built railway. <https://www.reuters.com/article/kenya-china-debt-idINL8N3234AQ>
- Rosario, J.D & Savage, R (2022). Zambia finance minister eager to renegotiate debt, awaits China's team. <https://www.reuters.com/world/africa/zambia-finance-minister-eager-renegotiate-debt-awaits-chinas-team-2022-10-15/>

- Ruiyao, L (2020). Coronavirus: in India, a traveller from China faces xenophobia and hardship as cases rise. <https://www.scmp.com/week-asia/people/article/3079620/coronavirus-india-traveller-china-faces-xenophobia-and-hardship>
- Savage dkk (2022). Analysis: China debt restructuring policy under scrutiny as more countries demand relief. <https://www.reuters.com/world/china/china-debt-restructuring-policy-under-scrutiny-more-countries-demand-relief-2022-09-08/>
- Singh dkk (2022). India's Neighbourhood Vaccine Diplomacy During COVID-19 Pandemic: Humanitarian and Geopolitical Perspectives. *Journal of Asian and African Studies*, 0(0). <https://doi.org/10.1177/00219096221079310>
- Syahrial, M (2021). 3 Perbedaan Vaksin Sinopharm dan Sinovac. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/18/103200765/3-perbedaan-vaksin-sinopharm-dan-sinovac?page=all>
- Tung, N.C (2022). US-China COVID-19 vaccine diplomacy competition in Vietnam: where vaccines go, influence may follow. *Australian Journal of International Affairs* Volume 76, 2022 - Issue 6 <https://doi.org/10.1080/10357718.2022.2077302>
- U.S. Department of State (1987). *Dictionary of International Relations Terms*,
- Van Ham, P (2001). The Rise of the Brand State: The Postmodern Politics of Image and Reputation. *Foreign Affairs* Vol. 80, No. 5 (Sep. - Oct., 2001), halaman 2-6 <https://doi.org/10.2307/20050245>
- Van Ham, P. (2002). Branding Territory: Inside the Wonderful Worlds of PR and IR Theory. *Millennium*, 31(2), 249–269. <https://doi.org/10.1177/03058298020310020101>
- Van Ham, P. (2003). War, Lies, and Videotape: Public Diplomacy and the USA's War on Terrorism. *Security Dialogue*, 34(4), 427–444. <https://doi.org/10.1177/0967010603344004>
- Van Ham, P. (2008). Place Branding: The State of the Art. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 616(1), 126–149. <https://doi.org/10.1177/0002716207312274>
- Wardah, F (2021). Indonesia Terima Bantuan Dua Juta Dosis Vaksin Sinovac dari China. <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-terima-bantuan-dua-juta-dosis-vaksin-sinovac-dari-china/6245181.html>
- Yibing, Z & Hao, Heather (2020). Chinese ventilator manufacturers ramp up production in global battle against COVID-19 pandemic. <https://news.cgtn.com/news/2020-04-09/Chinese-ventilator-manufacturers-contribute-in-battle-against-COVID-19-Py1PMez0oE/index.html>